

Studi Kelayakan dan Kebijakan Pembiayaan dalam Pengembangan Program Pendidikan

Teguh Trianung Djoko Susanto ^{1*}, Any Iffatus Syarifah ², Dinda Dawiyah ³, Faiza Adeela Kirana Budiman ⁴, Meiliani Margareta ⁵, Mitha Kurnia Yanti ⁶, Qoryafa Fatimah ⁷

¹⁻⁷ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email : teguhtrianungdjokos@unj.ac.id^{1*}, anyiffatuss@gmail.com², dindindaw@gmail.com³, faiza.adeela@gmail.com⁴, mellmelani79@gmail.com⁵, mithakurnia03@gmail.com⁶, qoryfatimah17@gmail.com⁷

Abstract : *In many developing contexts (e.g., Indonesia), educational programs frequently fail due to insufficient planning and funding frameworks. Despite growing attention to feasibility analyses and educational finance individually, the combined influence of feasibility studies and financing policies on program success remains underexplored. This represents a critical research gap that our study aims to fill. To address this gap, this study conducts a systematic literature review of regulatory frameworks, financial management practices, and case studies from countries such as Japan, Singapore, and Finland. The integrated analysis reveals that comprehensive feasibility assessments — covering market demand, institutional management, financial viability, legal and technical considerations, socio-cultural alignment, and economic impact are crucial for program success. It also identifies adaptive, data-driven financing policies as essential for sustainable implementation. By synthesizing these insights, the research contributes a novel framework linking feasibility and financing considerations, providing strategic guidance for improving educational program planning. The findings imply that integrating rigorous feasibility evaluation with flexible funding mechanisms is a strategic approach to enhancing the efficiency, accountability, and competitiveness of Indonesia's education system. For policymakers and practitioners, this means embedding coordinated evaluation and financing policies into educational program design to achieve more sustainable outcomes.*

Keywords: *Education Financing Policy, Educational Program Planning, Feasibility Study, Sustainable Education, Systematic Literature Review.*

1. PENDAHULUAN

Isu mengenai pembiayaan dan studi kelayakan dalam pengembangan program pendidikan semakin mendapat perhatian, seiring banyaknya program yang gagal atau tidak optimal akibat minimnya evaluasi kelayakan dan perencanaan pendanaan yang tepat (Irianto & Riani, 2021). Irianto & Riani menemukan bahwa ketidaktepatan alokasi dana dan lemahnya mekanisme pengawasan menjadi penyebab utama inefisiensi dalam program pendidikan di tingkat daerah. Selain itu, tanpa studi kelayakan menyeluruh, sebuah program berisiko tidak berkelanjutan karena aspek teknis dan finansial tidak diperhitungkan secara memadai (Muslikhin & Khoeruddin, 2023).

Studi kelayakan, menurut Muslikhin & Khoeruddin (2023), adalah proses sistematis untuk menilai berbagai dimensi program teknis, ekonomi, sosial, dan finansial demi memastikan prospek jangka panjangnya. Di sisi lain, kebijakan pembiayaan menetapkan kerangka alokasi dan mekanisme pendanaan yang menopang implementasi program. Meskipun keduanya penting, literatur cenderung membahas studi kelayakan dan kebijakan pembiayaan

secara terpisah, sehingga belum tersedia kerangka terpadu yang membantu perencana menyelaraskan kedua aspek tersebut dalam satu model perencanaan program.

Hingga kini belum ada kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan studi kelayakan dengan kebijakan pembiayaan dalam satu kerangka konseptual untuk pengembangan program pendidikan, baik pada konteks nasional Indonesia maupun perbandingan internasional.

Penelitian ini hadir untuk menjembatani gap tersebut dengan (1) menguraikan komponen studi kelayakan (pasar, manajemen, keuangan, hukum, teknis, sosial-budaya, ekonomi) dan mekanisme kebijakan pembiayaan (alokasi anggaran, skema pendanaan, akuntabilitas), serta (2) menyusun kerangka konseptual integratif yang memadukan kedua elemen, sehingga program dapat dirancang dengan simultan memperhatikan kelayakan operasional dan keberlanjutan finansial.

Model perencanaan holistik yang dihasilkan menjadi alat baru bagi pemerintah, lembaga, dan praktisi untuk merancang program pendidikan yang sekaligus layak dijalankan dan didanai berkelanjutan mengisi kekosongan literatur dan praktik selama ini.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) yang mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta Analysis (PRISMA). Dalam konteks penerapan pedoman PRISMA, artikel-artikel yang dibahas terkait dengan "Studi Kelayakan dan Kebijakan Pembiayaan" diambil dari sumber-sumber di Google Scholar untuk dilakukan tinjauan secara sistematis. Adapun elemen-elemen dari pedoman PRISMA yang digunakan mencakup kriteria kelayakan, sumber informasi, strategi pencarian, proses seleksi, proses pengumpulan data, dan item data.

Pada tahap kriteria kelayakan, penelitian ini meninjau semua artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dan SINTA, yang membahas topik "Studi Kelayakan dan Kebijakan Pembiayaan." Salah satu pertimbangan dalam pemilihan artikel adalah tahun publikasi, di mana hanya artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2025, yang dipertimbangkan.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

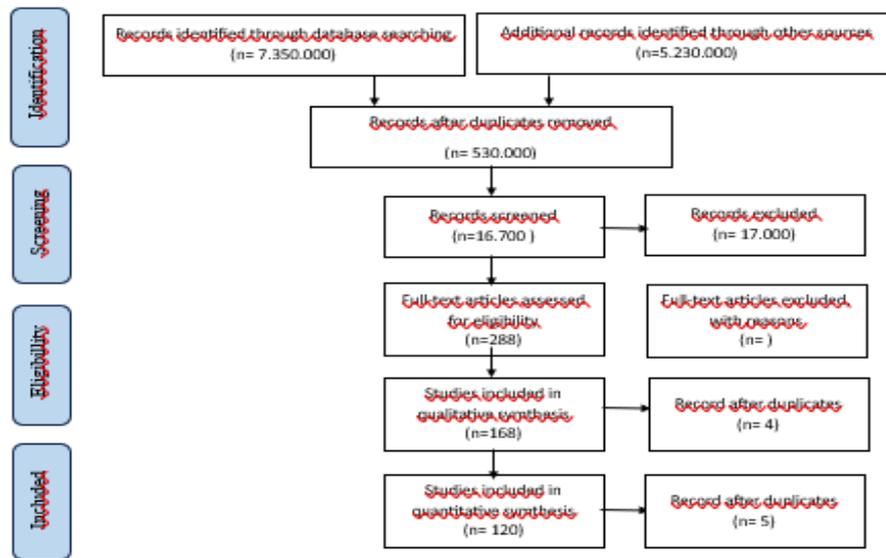
No	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1	Publikasi pada tahun 2020 - 2025	Publikasi sebelum tahun 2020
2	Jurnal terindeks	Jurnal tidak terindeks

3	Spesifik terkait studi kelayakan dan kebijakan pembiayaan pendidikan	Topik umum pendidikan profesional seperti Kedokteran, Kesehatan, Sosial Budaya dan Teknik.
4	Menggunakan bahasa inggris	Tidak menggunakan bahasa inggris
5	Artikel termuat identitas studi kelayakan dan kebijakan pembiayaan pendidikan	Tidak termuat identitas studi kelayakan dan kebijakan pembiayaan pendidikan

Dalam studi ini, penelusuran artikel dilakukan melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci ("studi kelayakan" OR "feasibility study") AND ("pembiayaan pendidikan" OR "education financing"). Selanjutnya, dilakukan penyaringan pada database literatur untuk membatasi pencarian, dengan fokus pada publikasi yang terbit antara tahun 2020 hingga 2025. Pencarian literatur ini dilakukan pada bulan April 2025, sehingga studi yang dipublikasikan setelah tahun 2025 tidak termasuk dalam ulasan ini. Artikel yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Hasil dari penelusuran ini menghasilkan 15 studi yang memenuhi kriteria, berasal dari jurnal nasional dan internasional yang telah diterbitkan.

Dalam proses pengumpulan data, metode yang dipilih mencakup pengambilan informasi dari artikel nasional berbahasa Indonesia dan artikel internasional berbahasa Inggris. Data yang dikumpulkan dari setiap penelitian meliputi nama penulis, periode penelitian, desain penelitian, jumlah sampel atau subjek, cara pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian, dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut.

Berikut merupakan Diagram PRISMA pada penelitian SLR:



Gambar 1. PRISMA Flow Chart of Articles Selection

3. TEMUAN DAN ANALISIS

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara studi kelayakan dan kebijakan pembiayaan pendidikan menjadi faktor strategis dalam pengembangan program pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui telaah sistematis terhadap literatur nasional dan internasional, diperoleh beberapa temuan utama berikut.

Pengertian Studi Kelayakan Program Pendidikan

Studi kelayakan adalah sebuah studi untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap kelayakan sebuah usaha. Layak atau tidak layak dijalankannya sebuah usaha merujuk pada hasil perbandingan semua faktor ekonomi yang akan dialokasikan ke dalam sebuah usaha atau bisnis baru dengan hasil pengembaliannya yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Studi kelayakan program pendidikan merupakan sebuah kajian sistematis dan komprehensif yang dilakukan untuk menilai apakah suatu program pendidikan yang direncanakan layak untuk dilaksanakan, baik dari sisi kebutuhan, kesiapan institusi, potensi sumber daya, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan sistem pendidikan secara luas. Proses ini melibatkan penilaian dari berbagai aspek, seperti kebutuhan masyarakat, prospek pekerjaan bagi lulusan, ketersediaan sumber daya, serta keberlanjutan program tersebut.

Menurut (Satyawan et al, 2020), studi kelayakan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki institusi pendidikan, serta arah kebijakan pendidikan nasional. Hal ini

sejalan dengan pandangan (Qosim, 2023) yang menyatakan bahwa studi kelayakan bukan hanya bertujuan untuk mengetahui apakah suatu program bisa dijalankan, tetapi juga untuk mengukur dampaknya terhadap mutu pendidikan dan relevansinya terhadap perkembangan zaman dan dunia kerja.

Dalam skala internasional, studi kelayakan juga dipandang sebagai langkah awal evaluasi efektivitas program sebelum diterapkan secara luas. Studi kelayakan sangat penting dalam pengembangan program pelatihan lintas negara untuk memastikan bahwa rancangan program benar-benar mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dan relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan global.

Aspek-Aspek Studi Kelayakan Pendidikan

Menurut (Nurhadi, 2023) terdapat tujuh aspek studi kelayakan lembaga pendidikan. Pertama, aspek pasar dan promosi, yang dimana pada aspek ini kita perlu melihat kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan, mencakup siapa yang jadi sasaran pasar, calon siswa, daya beli masyarakat, serta cara promosi yang pas untuk menarik minat masyarakat. Kedua, aspek manajemen, yaitu dengan melihat kemampuan lembaga pendidikan mengatur semua sumber daya dengan baik dan efisien, mencakup perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengembangan tenaga pendidik dan sistem administrasi sesuai tujuan pendidikan. Ketiga, aspek keuangan, yaitu dengan melihat kelayakan dari sisi biaya dan pendapatan, termasuk proyeksi anggaran operasional, sumber dana, serta analisis keuangan.

Kemudian yang keempat, aspek hukum dan legalitas, yaitu kita perlu memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi semua aturan hukum, termasuk izin pendirian, akreditasi, serta regulasi nasional yang berlaku. Kelima, aspek teknis dan operasional, yaitu dengan menilai kesiapan fasilitas dan sarana pendukung seperti ruang belajar yang nyaman, alat pembelajaran yang memadai, serta efisiensi operasi harian lembaga. Kemudian, aspek sosial dan budaya, yaitu dengan melihat sejauh mana lembaga pendidikan selaras dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitar. Lembaga pendidikan harus menghormati serta mendukung perkembangan budaya lokal agar bisa diterima dengan baik. Terakhir, aspek ekonomi, yaitu dengan menilai dampak positif lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti menciptakan pekerjaan.

Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia telah diatur secara tegas melalui berbagai regulasi, mulai dari UUD 1945 Pasal 31 hingga UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua regulasi ini mewajibkan negara untuk menjamin

tersedianya anggaran pendidikan, minimal 20% dari APBN dan APBD, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Meski secara normatif sudah cukup kuat, implementasi di lapangan belum sepenuhnya ideal. Menurut Wandra & Hadiyanto (2021), tantangan utama dalam pembiayaan pendidikan adalah ketidakefisienan penggunaan anggaran, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kapasitas manajerial di satuan pendidikan. Hal ini menghambat optimalisasi program-program seperti BOS dan BOP yang seharusnya menjadi penopang utama operasional sekolah.

Maharani et al. (2024) menambahkan bahwa siklus pembiayaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sering kali tidak berjalan maksimal. Banyak sekolah masih belum mampu menyusun anggaran berbasis kebutuhan yang akurat, sehingga alokasi dana cenderung tidak tepat sasaran.

Selain itu, praktik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mendorong peran masyarakat dalam pembiayaan justru menimbulkan persoalan baru, seperti pungutan yang tidak transparan dan lemahnya akuntabilitas komite sekolah. Hal ini dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan pemerataan. Penguatan kapasitas manajemen keuangan di sekolah serta pengawasan yang lebih ketat menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.

Konsep Studi Kelayakan

Studi kelayakan (*Feasibility Study*) adalah sebuah studi yang dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan, dari sebuah gagasan/proyek yang akan atau sedang direncanakan apakah dapat diterima atau ditolak. Pengertian layak disini adalah kemungkinan dari gagasan/ proyek yang akan dilaksanakan apakah dapat memberikan manfaat (*benefit*) baik dari segi *financial benefit* maupun dari segi *social benefit*. Dilihat dari aspek penilaian yang dilakukan layaknya suatu *financial benefit* maupun dalam arti *social benefit* tidak selalu menggambarkan layak dalam arti financial benefit artinya layak dari segi satu, belum tentu dikatakan layak dari segi lainnya.

Menurut O'Brien, studi kelayakan merupakan tahap awal yang penting dalam merumuskan informasi terkait kebutuhan pengguna akhir, sumber daya yang diperlukan, biaya, manfaat, dan kelayakan dari proyek yang diusulkan. Sementara itu, Andri Kristanto mengemukakan bahwa studi kelayakan adalah proses yang paling berpengaruh karena mencakup berbagai aspek dari sistem yang direncanakan. Ada lima tujuan utama dari pelaksanaan studi kelayakan, yaitu:

1. Menghindari Risiko Kerugian

Studi kelayakan berfungsi untuk meminimalisir risiko kerugian di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan pengidentifikasian kondisi yang dapat dipastikan mengandung risiko serta yang tidak. Dengan demikian, studi ini membantu dalam mengambil langkah-langkah preventif.

2. Memudahkan Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan

Agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar, diperlukan rencana yang lengkap dan terstruktur. Data yang disusun dalam pedoman tersebut dirancang secara sistematis, sehingga dapat diaplikasikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan mencapai hasil yang tepat.

3. Memudahkan Pengawasan

Dengan adanya rencana pelaksanaan yang jelas berdasarkan pedoman yang telah disusun, para pelaksana akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek tidak menyimpang dari rencana awal.

4. Memudahkan Pengendalian

Setelah pengawasan dilakukan, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, pengendalian dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk menjaga agar pelaksanaan proyek tetap sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Hubungan antara Kebijakan Pembiayaan dengan Konsep Studi Kelayakan

Keuangan berperan penting dalam membantu sebuah proyek mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang terkait dengan strategi bisnis tertentu. Risiko-risiko ini bisa beragam, mulai dari risiko keuangan yang terkait dengan fluktuasi nilai uang, risiko operasional yang muncul akibat masalah produksi, hingga risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan preferensi pelanggan. Melalui analisis keuangan, sebuah proyek dapat mengelola risiko tersebut dan memperkecil dampak negatif yang mungkin timbul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini juga relevan dalam proses pembiayaan saat melaksanakan studi kelayakan, terutama jika ditinjau dari berbagai aspek yang ada dalam studi kelayakan untuk setiap proyek di lembaga pendidikan.

Tabel 2. Hubungan antara Kebijakan Pembiayaan dengan Konsep Studi Kelayakan

Perencanaan dan Alokasi Anggaran	Studi kelayakan membantu merencanakan dan mengalokasikan anggaran pendidikan secara efektif dan efisien. Analisis aspek keuangan dalam studi kelayakan
---	--

	memberikan data untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan program pendidikan dan potensi pengembaliannya (Irfan & Rizkia, 2018).
Evaluasi Efektivitas Program	Studi kelayakan digunakan sebagai langkah awal evaluasi efektivitas program sebelum diterapkan secara luas, memastikan program mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dan relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan global namun tetap efisien (Yamamoto et al., 2022).
Pengambilan Keputusan	Studi kelayakan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan terkait investasi dan pengembangan program pendidikan. Hasil studi kelayakan membantu para pembuat kebijakan untuk menentukan apakah suatu program pendidikan layak didanai berdasarkan potensi manfaat finansial dan sosial yang diharapkan (Ibrahim, 2003).
Transparansi dan Akuntabilitas	Studi kelayakan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, yang merupakan tujuan utama dari kebijakan pembiayaan di Indonesia maupun di negara lain. Dengan melakukan studi kelayakan yang komprehensif, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Pentingnya Integrasi Antara Studi Kelayakan dan Kebijakan Pembiayaan

Studi kelayakan dan kebijakan pembiayaan merupakan dua elemen strategis yang saling melengkapi dalam perencanaan dan pengembangan program pendidikan. Keduanya memiliki posisi krusial dalam memastikan bahwa program atau lembaga pendidikan tidak hanya layak dijalankan secara konseptual, tetapi juga memiliki dukungan sumber daya yang memadai dan dikelola secara berkelanjutan. Studi kelayakan berfungsi sebagai perangkat analisis

mengevaluasi kelangsungan suatu program pendidikan dari berbagai aspek, sedangkan kebijakan pembiayaan menjamin keberlangsungan operasional dengan penyediaan dana yang terstruktur dan terukur. Dalam konteks ini, studi kelayakan tidak hanya berperan dalam tahap awal pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai panduan strategis untuk pelaksanaan dan evaluasi.

Dalam konteks lembaga pendidikan, studi kelayakan mencakup tujuh aspek yang saling berkaitan: pasar dan promosi, manajemen, keuangan, hukum dan legalitas, teknis-operasional, sosial-budaya, serta dampak ekonomi. Aspek pasar dan promosi, misalnya, menyoroti pentingnya pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat serta potensi penerimaan program oleh sasaran yang dituju. Melalui pemahaman daya beli masyarakat dan respons calon peserta didik, institusi pendidikan dapat menyusun strategi promosi yang tepat sasaran serta menyesuaikan biaya pendidikan agar tetap inklusif.

Aspek manajemen menjadi dimensi lain yang menekankan kapabilitas institusi dalam mengelola sumber daya secara sistematis. Ketidakefisienan pembiayaan seperti yang terjadi pada praktik program BOS dan BOP menjadi cerminan lemahnya integrasi antara studi kelayakan dan perencanaan anggaran. Sementara itu, aspek keuangan dalam studi kelayakan menyajikan analisis detail mengenai estimasi biaya, sumber pendanaan, serta proyeksi keuntungan atau manfaat jangka panjang. Instrumen analisis seperti *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Payback Period* digunakan untuk mengukur rasionalitas ekonomi dari suatu program pendidikan. Kebijakan pembiayaan yang tidak mempertimbangkan data dari studi kelayakan keuangan cenderung menghasilkan alokasi anggaran yang tidak optimal. Misalnya, ketika suatu lembaga pendidikan tidak melakukan perhitungan kelayakan biaya operasional, maka sangat mungkin terjadi defisit anggaran yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hasil analisis finansial dalam studi kelayakan dengan perencanaan anggaran menjadi syarat mutlak dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan.

Pada aspek legalitas dan hukum turut menentukan sejauh mana program pendidikan mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini berkaitan erat dengan legitimasi lembaga dan kemampuannya dalam mengakses sumber pendanaan resmi dari negara. Program pendidikan yang tidak memenuhi standar legal tidak hanya berisiko mendapatkan sanksi administratif, tetapi juga akan kesulitan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan harus diarahkan untuk mendukung program-program yang telah terverifikasi secara hukum dan memenuhi syarat akreditasi.

Dari sisi teknis dan operasional, kesiapan infrastruktur serta kelengkapan fasilitas pembelajaran menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan suatu program pendidikan. Studi kelayakan memberikan gambaran tentang kebutuhan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, laboratorium, dan teknologi pendukung. Informasi ini sangat vital dalam proses perencanaan anggaran, agar pengalokasian dana pembangunan dan perawatan fasilitas dilakukan secara tepat dan tidak terjadi tumpang tindih atau kekurangan.

Sedangkan, pada aspek sosial dan budaya dalam studi kelayakan memberikan kerangka untuk menilai kesesuaian program pendidikan dengan nilai-nilai lokal dan karakteristik masyarakat sekitar. Ketika kebijakan pembiayaan tidak mempertimbangkan aspek sosial budaya, maka bisa terjadi penolakan masyarakat terhadap program pendidikan yang dianggap tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai lokal. Oleh karena itu, pendanaan pendidikan harus memperhatikan konteks sosial untuk menjamin efektivitas implementasi program.

Terakhir, pada aspek ekonomi menyoroti kontribusi lembaga pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendidikan yang layak tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga mendorong terbukanya lapangan kerja dan peningkatan daya saing lokal. Dengan memahami dampak ekonomi dari pendidikan, pemerintah dapat mengarahkan investasi pendidikan ke sektor-sektor yang memberikan nilai tambah tinggi bagi pembangunan wilayah.

Adanya kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat melalui UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003. Kewajiban alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD menunjukkan komitmen negara dalam mendukung sektor pendidikan. Namun, tantangan muncul pada level implementasi. Ketidakefisienan penggunaan anggaran, lemahnya pengawasan, dan kapasitas manajerial yang rendah di tingkat satuan pendidikan mengindikasikan bahwa kebijakan pembiayaan belum sepenuhnya berbasis pada kajian yang komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara perencanaan keuangan dan kebutuhan riil lembaga pendidikan. Siklus pembiayaan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sering kali tidak berjalan optimal karena tidak diawali dengan studi kelayakan yang menyeluruh. Sekolah dan institusi pendidikan sering menyusun anggaran berdasarkan estimasi kasar tanpa analisis kebutuhan yang terukur, sehingga pengalokasian dana menjadi tidak tepat sasaran.

Praktik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang seharusnya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan, dalam beberapa kasus justru menimbulkan masalah baru, seperti pungutan yang tidak transparan dan lemahnya akuntabilitas. Hal ini menunjukkan

perlunya penguatan kapasitas manajemen keuangan di tingkat sekolah yang berbasis pada analisis kelayakan program. Studi kelayakan akan memberikan dasar rasional dalam menentukan kebutuhan pendanaan, sehingga pengumpulan dana dari masyarakat dapat dilakukan secara terukur dan akuntabel. Integrasi studi kelayakan dengan kebijakan pembiayaan tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan dana, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik. Setiap pengeluaran dapat ditelusuri kembali pada kebutuhan yang teridentifikasi melalui studi kelayakan, sehingga mendorong transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Dalam jangka panjang, integrasi ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam mendukung program-program pendidikan. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, integrasi antara studi kelayakan dan kebijakan pembiayaan harus dijadikan sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Pemerintah, melalui kementerian terkait, perlu mengembangkan sistem perencanaan anggaran yang berbasis pada kajian kelayakan secara sistematis dan terstandar. Pendekatan ini tidak hanya memastikan efektivitas penggunaan dana, tetapi juga memperkuat relevansi program pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah juga perlu mengadopsi pendekatan serupa dalam merancang dan membiayai program pendidikan lokal. Dengan menjadikan studi kelayakan sebagai komponen wajib dalam perencanaan pendidikan, pemerintah daerah dapat menghindari duplikasi program, mengurangi ketidaktepatan alokasi dana, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah masing-masing. Dapat disimpulkan, integrasi antara studi kelayakan dan kebijakan pembiayaan pendidikan adalah fondasi penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Tanpa integrasi ini, program-program pendidikan berisiko menjadi tidak relevan, tidak berdaya guna, dan gagal mencapai tujuannya. Studi kasus nyata dalam perencanaan keuangan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang baik, dimulai dari visi dan misi sekolah hingga penyusunan dan penetapan RAPBS, dapat mewujudkan kegiatan sekolah yang efektif dan efisien. Koordinasi antara kepala sekolah, staf, guru, dan komite sekolah dalam menyusun rencana kegiatan dan sumber dana sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya sistematis dan terstruktur untuk menyatukan dua komponen ini harus menjadi agenda prioritas dalam reformasi pendidikan di Indonesia.

Analisis Studi Kasus Internasional

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial dalam pengembangan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. UNESCO menjelaskan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan internasional didefinisikan sebagai “*a political and social decision-making process in which public revenue and other resources are collected and allocated to finance education and lifelong learning opportunities.*” atau dalam bahasa Indonesia, kebijakan ini merupakan sebuah proses pengambilan keputusan politik dan sosial, di mana pendapatan publik dan sumber daya lainnya dikumpulkan dan dialokasikan untuk membiayai pendidikan serta peluang pembelajaran sepanjang hayat. Penjelasan ini mencerminkan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan internasional bukan sekadar teknis alokasi anggaran, melainkan mencakup aspek politik dan sosial yang kompleks.

Dalam tataran global, UNESCO merekomendasikan agar negara-negara mengalokasikan sekitar 4–6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau 15–20% dari total belanja negara untuk sektor pendidikan. Rekomendasi ini menjadi tolak ukur minimal yang mencerminkan prioritas pendidikan dalam kebijakan nasional. Beberapa negara telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pembiayaan pendidikan melalui pendekatan yang berbeda, disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik masing-masing. Studi ini menyoroti tiga negara dengan model pembiayaan yang menonjol, yaitu Jepang, Singapura, dan Finlandia.

Tabel 3. Tabel Komparatif Pembiayaan Pendidikan

Aspek	Jepang	Singapura	Finlandia
Sumber Dana	Pemerintah membiayai pendidikan dasar dan menengah; individu membiayai sebagian pendidikan tinggi dengan subsidi pemerintah (Mitsumoto, 2024).	Pemerintah memberikan subsidi besar melalui <i>Tuition Grant Scheme</i> ; pendidikan tinggi sebagian dibiayai individu (Boon, 2023). 25% anggaran pemerintah dialokasikan untuk	Pemerintah membiayai penuh seluruh jenjang pendidikan, termasuk tunjangan biaya hidup (Niemi et al., 2021). Pendidikan didanai penuh oleh negara dari pajak umum

		pendidikan. 75% dana subsidi operasional dari pemerintah, sisanya dari donasi/swasta.	
Skema Bantuan	Beasiswa dan pinjaman pendidikan berbunga rendah melalui <i>Japan Student Services Organization (JASSO)</i> (Mitsumoto, 2024). Bantuan biaya sekolah untuk SMA negeri hingga 118.800 yen/tahun (biaya sekolah bisa 0 yen). Syarat: domisili Jepang, pengajuan lewat sekolah, seleksi berdasar pendapatan keluarga	Beasiswa penuh untuk pelajar asing (misal, <i>ASEAN Scholarships</i>). Subsidi biaya sekolah untuk warga negara dan penduduk tetap, <i>Tuition Grant</i> , pinjaman pendidikan CPF, serta beasiswa dan bantuan keuangan lain.	Semua biaya pendidikan (SD hingga universitas) gratis untuk warga negara dan penduduk tetap. Buku, makan siang, dan transportasi sekolah juga gratis. Tidak ada biaya sekolah, semua didanai negara. Beasiswa, tunjangan sosial untuk biaya hidup mahasiswa melalui lembaga sosial Kela.
Dampak Ekonomi	Mengurangi beban keuangan keluarga, terutama kelas menengah ke bawah. Memperluas akses pendidikan dengan tantangan selektivitas beasiswa (Mitsumoto, 2024).	Investasi besar di pendidikan meningkatkan kualitas SDM dan daya saing global. Pendidikan menjadi lebih bagi semua lapisan masyarakat dan lulusan diarahkan masuk	Pendidikan gratis meningkatkan pemerataan kesempatan dan kualitas SDM nasional. Pendidikan dianggap investasi utama pembangunan ekonomi. Pendidikan

		pasar kerja domestik (Boon, 2023).	memperkuat kesetaraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Niemi et al., 2021).
--	--	------------------------------------	---

Ketiga negara, yakni Jepang, Singapura, dan Finlandia, menerapkan skema pembiayaan pendidikan yang berbeda, namun sama-sama menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Jepang mengandalkan kombinasi dana publik dan swasta, dengan skema bantuan yang cukup komprehensif untuk kelompok ekonomi tertentu. Singapura menekankan pada subsidi pemerintah dan beasiswa, baik untuk warga negara maupun pelajar internasional, guna menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan kompetitif. Sementara itu, Finlandia menonjol dengan sistem pendidikan gratis yang dibiayai hampir sepenuhnya oleh negara, mencakup seluruh jenjang pendidikan serta fasilitas pendukung lainnya. Dampak ekonomi dari kebijakan pembiayaan pendidikan di ketiga negara tersebut sangat signifikan, mulai dari pengurangan beban keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga terciptanya kesetaraan akses pendidikan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Studi kasus pembiayaan pendidikan di Jepang, Singapura, dan Finlandia memperlihatkan variasi pendekatan negara dalam mengelola pembiayaan pendidikan, yang dapat dianalisis menggunakan indikator internasional dari *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yakni rasio partisipasi pendidikan tinggi dan angka pengembalian investasi pendidikan (*rate of return to education*). Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Co-operation and Development*), sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan pada tahun 1961 dan berkantor pusat di Paris, Perancis. OECD ini adalah organisasi yang berfokus pada kerjasama ekonomi dan koordinasi kebijakan antara negara-negara maju di dunia. Indikator ini digunakan secara luas dalam evaluasi kebijakan pendidikan global karena mampu mengukur dua hal penting yaitu akses terhadap pendidikan tinggi dan efektivitas ekonomi hasil dari pendidikan tersebut.

Analisis Terhadap Kebijakan Saat Ini dan Apa yang Perlu Diperbaiki

Sistem pendidikan Indonesia, meskipun telah memperoleh dukungan anggaran yang besar melalui amanat konstitusi dengan alokasi minimal 20% dari APBN, masih menghadapi tantangan serius dalam aspek efektivitas kebijakan pembiayaan dan studi kelayakan. Secara normatif, kerangka kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam implementasinya, banyak program pendidikan yang tidak mencapai hasil optimal karena lemahnya perencanaan keuangan dan ketiadaan studi kelayakan yang komprehensif. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya alokasi anggaran belum sebanding dengan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas dana pendidikan, terutama di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana infrastruktur pendidikan masih jauh dari kata memadai. Isu pembiayaan dan studi kelayakan dalam pendidikan kian mendapat perhatian karena dampak langsungnya terhadap keberhasilan program. Kegagalan berbagai program pendidikan akibat lemahnya perencanaan dan tidak adanya evaluasi kelayakan yang sistematis. Program-program tersebut seringkali diluncurkan tanpa dasar kebutuhan riil di lapangan, yang berujung pada pemborosan sumber daya negara.

Di Indonesia, kendala utama dalam pembiayaan pendidikan masih berkisar pada lemahnya kapasitas perencanaan di tingkat satuan pendidikan. Minimnya literasi anggaran dan perencanaan berbasis data menjadi penyebab tidak sinkronnya antara kebutuhan riil sekolah dan alokasi dana dari pusat. Hal ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi penggunaan anggaran, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, dalam praktik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), partisipasi masyarakat yang seharusnya memperkuat pembiayaan justru kadang menciptakan masalah baru, seperti pungutan liar dan lemahnya transparansi.

Mempertimbangkan dinamika ini, arah kebijakan pendidikan di Indonesia perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial di tingkat sekolah, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembiayaan, serta integrasi studi kelayakan sebagai syarat wajib dalam pengembangan program pendidikan. Studi kelayakan juga harus diperluas cakupannya seperti aspek pasar, manajemen, keuangan, hukum, teknis, sosial budaya, dan ekonomi. Pendekatan ini akan memberikan kerangka kerja yang menyeluruh dan kontekstual, sehingga program pendidikan yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran. Selain penguatan internal, kolaborasi antar-lembaga dan pertukaran pengetahuan internasional juga perlu ditingkatkan. Digitalisasi pendidikan, salah satu peluang global saat ini, harus dimanfaatkan secara optimal melalui program berbasis bukti dan evaluasi kelayakan teknologi yang akan diterapkan. Perencanaan pembiayaan untuk digitalisasi, misalnya, harus

mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan aksesibilitas siswa di seluruh wilayah. Tanpa kajian kelayakan digital yang matang, upaya transformasi pendidikan digital justru berpotensi memperlebar kesenjangan.

4. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa integrasi antara studi kelayakan dan kebijakan pembiayaan adalah dasar strategis dalam pengembangan serta perencanaan program pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Studi kelayakan diperlukan untuk secara sistematis mengevaluasi berbagai elemen seperti pasar, manajemen, keuangan, hukum, teknis, sosial-budaya, dan dampak ekonomi sebelum pelaksanaan program pendidikan. Di sisi lain, kebijakan pembiayaan harus dirancang dengan adaptif dan berdasarkan data untuk memastikan keberlangsungan program pendidikan. Namun, penting untuk diakui bahwa penelitian ini memiliki batasan, karena hanya mengkaji literatur dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga mungkin mengesampingkan temuan penting dari negara-negara dengan bahasa lain. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dengan memperhatikan batasan tersebut.

Pengalaman dari berbagai negara seperti Jepang, Singapura, dan Finlandia, terlihat bahwa keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya dana, melainkan oleh ketepatan perencanaan, kejelasan kebijakan, dan kesesuaian implementasi di lapangan. Oleh karena itu, integrasi antara studi kelayakan yang komprehensif dengan kebijakan pembiayaan yang adaptif menjadi langkah fundamental untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berdaya saing global.

Di Indonesia sendiri, tantangan yang dihadapi saat ini terletak pada ketidakefisienan pengelolaan anggaran, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kapasitas manajerial satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan berbasis data dan kebutuhan nyata. Sebagai langkah konkret untuk memperbaiki keadaan tersebut, dua kebijakan utama disarankan.

Sebagai contoh, mengadopsi pendekatan seperti Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pemerintah perlu membentuk *Education Feasibility Assessment Body* (EFAB) sebagai lembaga yang bertugas menyusun standar studi kelayakan program pendidikan, memeriksa aspek operasional dan finansial sebelum persetujuan pendanaan diberikan, dan mengawal efisiensi alokasi anggaran di tingkat pusat dan daerah. Model ini mengambil inspirasi dari praktik kelembagaan seperti BSNP, yang selama ini berperan dalam penjaminan mutu pendidikan berbasis standar. Kemudian, perlu dilakukan penyertaan modul studi kelayakan dalam kurikulum pelatihan untuk kepala sekolah. Modul ini seharusnya mencakup kemampuan analisis kebutuhan, penilaian kelayakan keuangan, pengelolaan risiko, serta pemantauan dan

evaluasi program yang berbasis data. Pelaksanaan kedua rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan manajerial lembaga pendidikan, meningkatkan efektivitas pengalokasian anggaran, serta memperbaiki tanggung jawab dalam sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Boon, Z. (2023). Leaders of Future-Ready Learners in the Singapore Education System: Perceptions, Roles and Implications. *Asia Pacific Journal of Education*, 43(3), 759–774. <https://doi.org/10.1080/02188791.2023.2231648>
- Fironika, R. Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(1), 43–64. <http://dx.doi.org/10.30659/pendas.2.1.43-64>
- Haryanto, B. (2024). Sistem Pendidikan Di Finlandia Sebagai Pelajaran Yang Di Petik (Lesson Learnt) Untuk Pendidikan Indonesia. *Insan Cendekia: Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan*, 3(1), 23-34.
- Irianto, B. R., & Riani, L. P. (2024). Permasalahan Pembiayaan Pendidikan Pada Otonomi Daerah Di Indonesia. *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 85-97.
- Lestari, E., Kisworo, B., & Khudhori, K. U. (2023). Studi Kelayakan Bantuan Baznas Rejang Lebong Dalam Pengembangan Program Ekonomi Kreatif (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Muslikhin, M., & Khoeruddin, L. A. (2023). Isu Etika Dalam Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar: Pertimbangan Dan Solusi: Ethical Issues in the Educational Financing Management System in Elementary Schools: Considerations and Solutions. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(2), 239-253. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v2i2.222>
- Ma'sum, T. (2025). Analisis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *JIEM: Journal Of Islamic Education and Management*, 5(2), 34-45.
- Mitsumoto, S. (2024). An Educational Policy Analysis of the New Financial Support System for Higher Education. *Annual Bulletin of Japan Academic Society for Educational Policy*, 31, 10–22.
- Muliawan, M. R. (2022). *Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam the OECD Guidelines for Multinational Enterprises oleh Korporasi Transnasional di Indonesia* (Studi atas Kebijakan Sosial, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup PT. Freeport Indonesia Pasca-Divestasi Saham Freeport McMoRan Tahun 2018) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Niemi, H., Toom, A., & Lavonen, J. (2021). Education Reforms for Equity and Quality: An Analysis from an Educational Ecosystem Perspective with Reference to Finnish Educational Transformations. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 11(2), 13–35.

- Nurhadi, N. (2023). Aspek-aspek yang Dapat Meningkatkan Kinerja Produksi: Analisis Kelayakan Bisnis. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(5), 512-519. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.281>
- Polem, M., & Cahya, A. D. (2024). Kajian teoritis terkait kebijakan pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar dan menengah di Indonesia. *Action Research Journal (ARJ)*, 1(1), 55–72.
- Purba, A. W. A., Situmeang, N. T. F. N., Fitriani, D., Febry, K., Sihombing, F., & Siregar, Y. R. (2024). Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah. *NIZHAMIYAH*, 14(1), 64-80. <http://dx.doi.org/10.30821/niz.v14i1.3239>
- Purnomo, H., & Kurriwati, N. (2025). STUDI KELAYAKAN SEBAGAI MANEJEMEN PEMASARAN DESTINASI WISATA GOA JERUK, DAN FOOD COURT DESA KEBONAGUNG SUMENEP. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 15(1), 94-101. <https://doi.org/10.24929/feb.v15i1.4134>
- Pedoman Studi Kelayakan UKI Toraja, 2022: Studi kelayakan pembukaan program studi baru
- Suhana, S., Ad, E. S., & Ijudin, I. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah Terhadap Manajemen Anggaran Kegiatan Madrasah Untuk Mewujudkan Efektifitas Penggunaan Anggaran Madrasah (Studi Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut). *Khazanah Akademia*, 7(01), 1-12.
- Wandra, D., & Hadiyanto. (2021). Perencanaan pembiayaan pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2898–2904.